

PERMINTAAN PROPOSAL
INDONESIA - PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PROYEK FASILITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
15 APRIL 2009

Republik Indonesia mendapat dana dari Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias (Grant TF093358/ P109024) untuk Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Financing Facility/EDFF). Proyek EDFF akan membiayai serangkaian subproyek dalam mendorong pemulihan ekonomi pascatsunami serta pembangunan ekonomi jangka panjang yang merata dan berkesinambungan di Aceh. Subproyek dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh LSM, organisasi bantuan internasional atau asosiasi sektor swasta.

Pemerintah Daerah Aceh melalui Unit Pengelolaan Proyek (Project Management Unit/PMU) bagian dari BAPPEDA Provinsi Aceh¹ saat ini mengundang Badan Pelaksana Subproyek (Sub-project Implementing Entities/SIE) untuk menyampaikan proposal pembiayaan subproyek, yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemda Aceh (Contoh Aplikasi Subproyek yang harus digunakan disediakan sebagai Lampiran 1). SIE yang berminat bisa mendapatkan Formulir Aplikasi, Kriteria Kelayakan SIE dan informasi tambahan mengenai proyek dengan menghubungi EDFF PMU di infoedff.bappedanad@yahoo.com atau dengan mengunjungi www.nad.go.id (Pemda Aceh) or www.multidonorfund.org (MDF). **Tiga salinan proposal (dalam bahasa Inggris) sudah harus diserahkan ke alamat berikut pada tanggal 25 Juni 2009 sebelum pukul 5 sore.**

Unit Pengelolaan Proyek EDFF
Kantor Bappeda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lantai 3
Jln. Tgk. Daud Beureueh No. 26
Banda Aceh 23121 Indonesia
Telepon: +62 (0) 651-635687, Faksimile: +62 (0) 651-635687
Email: infoedff.bappedanad@yahoo.com

Selain salinan cetak, SIE juga harus mengirimkan proposal dalam versi elektronik ke:
Email: infoedff.bappedanad@yahoo.com.

Proyek EDFF. Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Aceh, sebuah Proyek pengayom senilai US\$50 juta, akan membantu melanjutkan rekonstruksi pasca-Tsunami dengan mendorong upaya rekonstruksi tahap berikutnya, yang menghasilkan pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan untuk seluruh masyarakat Aceh. Proyek ini dirancang untuk memberi kontribusi dalam penciptaan perbaikan kondisi untuk pembangunan ekonomi berkesinambungan yang hasil akhirnya, pengentasan kemiskinan, dengan mendukung program prioritas Pemda Aceh seperti yang dijelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah (Perpres 47/2008). Proyek ini berusaha mengisi beberapa kesenjangan yang tidak terjangkau oleh program Pemerintah sendiri. Proyek ini akan membantu pembangunan sektor swasta yang kompetitif dan lingkungan yang mendukung bisnis di Aceh dengan membantu mengatasi kelemahan struktural dan pengembangan kelembagaan yang menjadi sorotan setelah terjadi Tsunami dan kerugian bisnis yang diakibatkannya. Proyek ini juga akan

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berlokasi di Banda Aceh.

mendukung pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan iklim investasi dan mengatasi hambatan terhadap pengembangan sektor swasta dan halangan di sisi pasokan. Informasi terperinci mengenai Proyek EDFD, termasuk Dokumen Penilaian Proyek (Project Appraisal Document/PAD), dapat ditemukan di: <http://www.multidonorfund.org/p-edff.html>

Proyek EDFD akan membiayai serangkaian subproyek (sampai \$44.5 juta) untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Aceh. Unit Pengelolaan Proyek, didukung oleh perusahaan konsultan pengelolaan berkaliber konsultan internasional, akan bertanggung jawab atas pengelolaan Proyek EDFD. Bank Dunia, selaku badan mitra akan mengawasi pelaksanaan Proyek EDFD. Proyek EDFD akan membiayai subproyek yang memberi kontribusi terhadap tujuan pembangunan berikut: (i) **Pengembangan usaha penciptaan lapangan kerja berbasis pasar** yang terlibat dalam pemrosesan dan manufaktur bernilai tambah, terutama di bidang pertanian dan perikanan; (ii) Peningkatan **kualitas dan nilai produksi yang berkesinambungan** di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan yang memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan; (iii) **Peningkatan perdagangan internasional**, terutama ekspor langsung; dan (iv) **Peningkatan investasi domestik dan asing** di Aceh. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dalam jangka waktu menengah, yang akan menjadi fokus subproyek dan kegiatan yang didanai oleh EDFD sebagai berikut:

- (a) *Peningkatan Lingkungan Bisnis*: lingkungan yang lebih baik dalam mendukung investasi dan pengembangan sektor swasta;
- (b) *Dukungan Sektor Swasta*: dukungan untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor swasta, para petani dan nelayan; dan
- (c) *Infrastruktur Publik*: pembiayaan infrastruktur ekonomi yang diperlukan untuk pengembangan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.

Jenis subproyek indikatif dapat ditemukan dalam Dokumen Penilaian Proyek EDFD (<http://www.multidonorfund.org/p-edff.html>).

Indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) berikut akan digunakan untuk menilai capaian proyek terhadap hasil pembangunan yang diharapkan sebagaimana disebutkan di atas:

- (a) Jumlah hambatan bisnis yang berhasil diatasi di Aceh
- (b) Lapangan kerja yang diciptakan oleh subproyek
- (c) Jumlah pengguna infrastruktur publik yang dibiayai
- (d) Manfaat tidak langsung, misalnya, dampak limbah, pembangunan kapasitas, partisipasi wanita, dan lainnya.

Kriteria Kelayakan SIE. SIE yang layak adalah LSM (domestik dan internasional), asosiasi sektor swasta dan organisasi bantuan internasional. Perorangan, bisnis sektor swasta (yang berorientasi laba) atau badan pemerintah² tidak dapat ikut serta. Untuk dapat mengajukan aplikasi untuk EDFD, SIE harus:

² Walaupun universitas tidak diikutsertakan karena dianggap sebagai badan pemerintah, Yayasan dan LSM yang dibentuk oleh universitas layak dianggap sebagai SIE.

1. memiliki dasar legal untuk beroperasi di Indonesia (didukung akta notaris) dan untuk menerima dana Hibah;
2. telah mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur operasi standar, termasuk prosedur pengelolaan keuangan;
3. memiliki laporan audit dua tahun terakhir, terutama dengan opini unqualified; namun, pendapat qualified dengan temuan yang nonsignifikan dapat diterima tergantung pada kesepakatan antara PMU dan Bank Dunia;
4. bukan perorangan, bisnis sektor swasta (yang berorientasi laba) atau badan Pemerintah Indonesia (nasional atau daerah);
5. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak lain Proyek yang bertanggung jawab atas keputusan pendanaan, pemilihan atau pengawasan; dan
6. Dapat dan mau menandatangani Kesepakatan Hibah Subproyek dan melaksanakan Subproyek sesuai dengan persyaratan Proyek EDFD.

Kriteria Kelayakan Subproyek. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa subproyek yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan oleh PMU kepada Komite Pemilih memenuhi persyaratan sederhana untuk (i) diikutsertakan dalam Proyek EDFD; (ii) perancangan solusi teknis yang sesuai; (iii) viabilitas ekonomi dan keuangan, termasuk memastikan adanya mekanisme untuk operasi dan pemeliharaan investasi yang dibiayai EDFD (sejauh yang dapat diterapkan); (iv) konsultasi dengan kelompok-kelompok yang sesuai; (v) kepatuhan terhadap pendekatan yang telah disetujui mengenai perlindungan terhadap lingkungan, sosial dan fidusiari; dan (vi) memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang menjadi target. Sebagai tambahan, komponen setiap subproyek yang dipilih akan ditinjau atas konsistensinya dengan tujuan keseluruhan Proyek EDFD. Dalam mengevaluasi aplikasi subproyek, biaya pelaksanaan subproyek akan dipertimbangkan - SIE harus menjaga biaya tersebut seminimum mungkin. Luas subproyek yang diusulkan SIE telah melewati konsultasi dan persiapan dengan masyarakat penerima manfaat dan Dinas dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat Dua yang terkait serta tingkat kepemilikan proyek oleh pihak-pihak ini akan menjadi kriteria utama pemilihan. SIE harus merinci jenis konsultasi yang telah dilakukan serta perkiraan jenis keterlibatan untuk mendiskusikan rancangan subproyek, pelaksanaan serta untuk menyertakan pendapat masyarakat penerima manfaat dalam pengawasan dan evaluasi subproyek.

Kriteria dan Proses Pemilihan Subproyek. Proses evaluasi subproyek telah dibagi menjadi tiga tahap (lihat **Tabel 1** untuk perincian lebih lanjut).

Tahap Satu: Evaluasi prapemilihan untuk memastikan bahwa proposal dirancang untuk memenuhi prinsip ekonomi dan pengembangan sektor swasta yang ditetapkan oleh Pemda Aceh dan persyaratan Fasilitas MDF dan sasaran dasar EDFD. Proposal yang memenuhi standar ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam proses evaluasi Tahap Dua. Proposal yang tidak memenuhi standar akan ditolak.

Tahap Dua: Pada tahap ini, proposal subproyek akan dinilai secara lebih mendalam; dengan berfokus pada kriteria teknis, rancangan proyek serta aplikasi pelajaran yang didapatkan dan pembenaran ekonomis, lalu akan diberi peringkat secara kuantitatif. Subproyek yang lolos dalam tahap evaluasi ini dengan skor rata-rata minimum di atas 70³ persen akan mendapat

³ Panduan untuk pemberian skor akan dibuat oleh PMU untuk Komite Pemilih. Pada dasarnya, penilaian lebih dari 70 hanya akan diberikan kepada proyek yang memenuhi persyaratan minimum dalam kriteria

pertimbangan lebih lanjut di Tahap Tiga. Proposal yang tidak memenuhi skor minimum akan ditolak.

Tahap Tiga: Tahap ini berfokus pada penilaian usulan pengaturan untuk pelaksanaan serta kemampuan pemberi proposal dalam melaksanakan subproyek. Hanya proyek yang lolos dari evaluasi ini dengan skor rata-rata minimum di atas 70 persen akan disajikan kepada Komite Pemilih (walaupun belum tentu direkomendasikan untuk mendapatkan pendanaan).

Pemilihan Proposal Subproyek: Komite Seleksi yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Aceh, Pemerintah Pusat dan anggota masyarakat Akademis di Aceh telah ditetapkan untuk memilih subproyek. Proposal subproyek yang telah berhasil melewati proses tiga tahap akan dikirim ke Komite Seleksi. Komite Seleksi akan memilih, di antara seluruh proposal yang telah melewati ketiga Tahap, proposal yang paling sesuai dengan rencana provinsi untuk pengembangan ekonomi di Aceh. Oleh karena itu, lolos dari ketiga Tahap tidak menjamin bahwa proposal akan dipilih dan menerima pendanaan, dan hal ini kemungkinan besar terjadi jika Pemerintah Propinsi Aceh menerima proposal pendanaan yang jauh melebihi sumber daya yang tersedia.

Persiapan dan Persetujuan Subproyek: Proposal subproyek yang dipilih oleh Komite Seleksi akan ditinjau ulang oleh Bank Dunia yang kemudian memberikan surat tidak keberatan *no-objection* (NOL) Bank Dunia. Semua proposal subproyek terpilih yang menerima NOL Bank Dunia akan diberi tahu oleh PMU. Setelah penyelesaian pemilihan difinalisasi, Kesepakatan Subhibah akan ditandatangani antara PMU dan SIE. SIE yang dipilih untuk mendapatkan pembiayaan akan bertanggung jawab atas persiapan subproyek terperinci, termasuk rancangan awal, analisis berbagai alternatif, pelaksanaan studi kelayakan (termasuk penilaian perlindungan, studi lingkungan dan sosial yang diperlukan), diikuti dengan rancangan terperinci, anggaran, rencana pengadaan, pengawasan dokumen lelang, rencana pengawasan dan evaluasi. Rancangan subproyek akhir dan dokumen tender akan diserahkan kepada PMU untuk peninjauan dan kemudian kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL. Setelah NOL dikeluarkan oleh Bank Dunia untuk dokumen subproyek final dan penandatanganan Kesepakatan Subhibah Subproyek, SIE dapat meminta pembayaran sampai US\$100,000 untuk pembiayaan persiapan terperinci subproyek. Pengeluaran hanya boleh dikeluarkan setelah SIE diberi tahu bahwa proposalnya dipilih oleh PMU. Tidak ada pengeluaran sebelum tanggal tersebut yang akan diganti. Tidak akan ada pembayaran retroaktif. **Pelaksanaan semua kegiatan subproyek harus diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2012, agar Proyek EDFD dapat diselesaikan pada bulan Juni 2012.**

Pengawasan dan Evaluasi. Setiap SIE yang mencari bantuan EDFD yang mendapatkan persetujuan harus menyerahkan rencana terperinci untuk Pengawasan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation/M&E) yang konsisten dengan keseluruhan kerangka kerja M&E Proyek EDFD yang harus mencakup: (i) matriks kerangka kerja logis dengan spesifikasi yang jelas mengenai sasaran, tujuan, output serta perkiraan hasil dan dampak; (ii) kuantitas input yang terperinci dalam perhitungan biaya subproyek; (iii) prosedur pengumpulan dan analisis data yang diperlukan; dan (iv) tanggung jawab staf. SIE harus menyatakan secara terperinci bagaimana subproyeknya akan memberikan hasil dan memilih indikator kinerja utama yang sesuai. Indikator kinerja, bersama dengan penggunaannya dijelaskan dalam kerangka kerja

pemilihan tersebut. Pemberian skor di atas 70 harus mencerminkan sejauh mana kriteria tersebut dipenuhi dan kualitas proposal.

pengawasan hasil yang tersedia di EDFD PAD - SIE harus menggunakan kerangka kerja M&E ini serta menyediakan semua perincian yang diperlukan sesuai dengan kerangka kerja.

Pengelolaan Keuangan. EDFD akan mengikuti prosedur, kebijakan, akuntansi dan prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Indonesia, dengan prosedur yang lebih ketat jika perlu. Prosedur pemerintah ini mencakup, sebagai contoh, prosedur penganggaran pemerintah, standar akuntansi (PP no. 24, 2005) dan sistem akuntansi pemerintah (PerMenKeu no. 59/PMK.06/2005). SIE disarankan untuk menyertakan dalam proposal subproyek informasi terperinci mengenai prosedur operasi standar sehubungan dengan pengelolaan keuangan dan bagaimana hal ini sejalan dengan prosedur Pemerintah Indonesia.

Prosedur Pengadaan. Pengadaan barang dan jasa untuk subproyek yang dipilih akan dilakukan sesuai dengan “Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits” tertanggal Mei 2004 dan diamandemen pada bulan Oktober 2006, “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” tertanggal Mei 2004 serta diamandemen dan ketentuannya ditetapkan dalam Kesepakatan Hibah EDFD. SIE disarankan untuk menyertakan dalam proposal subproyek informasi terperinci mengenai rencana pengadaan dan pencairan dana mereka. SIE yang subproyeknya telah dipilih untuk mendapatkan pembiayaan EDFD harus mempersiapkan dokumen subproyek dengan rencana kegiatan dan rancangan terperinci, termasuk perincian mengenai rencana pengadaan dan pencairan dana mereka.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan panduan pengadaan Bank Dunia dapat ditemukan di: <http://go.worldbank.org/9P6WS4P5E1>

Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Semua subproyek akan diseleksi demi kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial⁴. Prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial terperinci tersedia di EDFD PAD.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan panduan Bank Dunia mengenai perlindungan lingkungan dan sosial dapat ditemukan di:
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPO L/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html> or
<http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0>

Rencana Tindakan Antikorupsi. Proyek EDFD akan tunduk kepada Rencana Tindakan Antikorupsi untuk EDFD. Pelajaran yang didapat dari pelaksanaan subproyek akan dibagikan secara luas. SIE harus mempersiapkan rencana pencegahan korupsi untuk subproyek, yang harus disertakan dalam dokumen subproyek. Sebagian strategi untuk menghindari korupsi dalam pelaksanaan subproyek harus melibatkan pemangku kepentingan dan penerima manfaat di setiap tahapan, termasuk kegiatan pengawasan dan evaluasi subproyek.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan Bank Dunia mengenai pengungkapan dokumen kepada publik dapat ditemukan di:
<http://www1.worldbank.org/operations/disclosure/documents/disclosurepolicy.pdf>

⁴ Studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) akan dilakukan dengan cara memberi tahu rancangan terperinci yang telah diselesaikan. Oleh karena itu, mitigasi lingkungan harus diintegrasikan, jika perlu, ke dalam gambaran teknis akhir dan dalam bill of quantities (jika perlu).

Tabel 1: Kriteria Evaluasi Subproyek

Tahap Satu Kriteria Prapemilihan			
Kriteria	Ya	Tidak	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> Apakah nilai proyek di atas US\$0.5 juta? 			<ul style="list-style-type: none"> Hanya proyek dengan batas minimum US\$0.5 juta yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan. Hanya proyek tertentu bernilai US\$0.5-1 juta akan dipertimbangkan dan proyek bernilai lebih dari US\$7 juta hanya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang luar biasa.
<ul style="list-style-type: none"> Prioritas yang ditetapkan dalam EDFF <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan - Konsisten dengan area yang akan dibiayai melalui EDFF 			<ul style="list-style-type: none"> Penting agar subproyek yang diusulkan memenuhi strategi Pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan keseluruhan prinsip partisipasi EDFF. Proposal harus menjelaskan bagaimana proposal akan memberi kontribusi terhadap tujuan pembangunan EDFF: (i) pengembangan usaha penciptaan lapangan kerja berbasis pasar yang terlibat dalam pemrosesan dan manufaktur bernilai tambah, terutama di bidang pertanian dan perikanan; (ii) peningkatan kualitas dan nilai produksi yang berkesinambungan di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan yang memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan; (iii) peningkatan perdagangan internasional, terutama ekspor langsung; dan (iv) peningkatan dalam investasi domestik dan asing di Aceh. Proposal menjelaskan bagaimana proposal sesuai area yang akan didukung EDFF: (i) Peningkatan Lingkungan Bisnis; (ii) Dukungan Sektor Swasta; dan (iii) Infrastruktur Publik
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan cepat dan dampak jangka panjang 			<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi harus secara eksplisit mengindikasikan periode pelaksanaan yang konsisten dengan kerangka waktu EDFF (pelaksanaan difinalisasi pada kuartal pertama 2012) Aplikasi mengilustrasikan dengan meyakinkan bagaimana hasil proyek akan memiliki dampak jangka panjang.
<ul style="list-style-type: none"> Mengisi kesenjangan dalam kegiatan pengembangan sektor swasta dan ekonomi saat ini 			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas ini tidak akan menyetujui subproyek yang merupakan duplikat atau jika tersedia sumber pembiayaan alternatif
<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan Masyarakat Setempat 			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas EDFF berusaha memastikan bahwa subproyek yang dipilih adalah subproyek yang didorong oleh permintaan dan telah dipersiapkan melalui konsultasi atau kemitraan dengan pemerintah daerah dan/atau

Tahap Satu Kriteria Prapemilihan			
Kriteria	Ya	Tidak	Penjelasan
			<p>masyarakat setempat dan memberi manfaat kepada masyarakat, atau Aceh secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberi proposal harus menyertakan informasi mengenai konsultasi ini dan menunjukkan dukungan dari lembaga/penerima manfaat yang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal juga harus merinci rencana untuk keterlibatan masyarakat penerima manfaat secara berkesinambungan dalam rancangan subproyek, pelaksanaannya serta pengawasan dan evaluasi hasil. • Proposal juga harus merinci tingkat dukungan yang diberikan oleh Dinas dan/atau pemerintah daerah tingkat dua yang terkait, apakah pembiayaan lanjutan akan dialokasikan jika perlu dan bagaimana subproyek sesuai dengan rencana Dinas/Pemerintah Daerah Tingkat Dua untuk pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
• Dukungan pemerintah			<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti bahwa Pemerintah mendukung proposal tersebut. Bukti dapat berupa surat yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang mendukung proyek, pembiayaan bersama atau proposal bersama.
• Kapasitas pelaksanaan			<ul style="list-style-type: none"> • Karena Pemda Aceh dan EDFF ingin menunjukkan keberhasilan, para pelamar harus menunjukkan pengalaman dalam mengimplementasikan proyek serupa seperti yang diusulkan. Jika tidak, mereka harus bermitra dengan LSM atau organisasi lain yang dapat membawa pengetahuan/keterampilan ini. Penilaian terperinci atas kapasitas ini akan dilakukan untuk semua subproyek yang memasuki Tahap Tiga proses pemilihan.
• Memenuhi panduan lingkungan			<ul style="list-style-type: none"> • Jika subproyek memiliki dampak lingkungan potensial, hal ini harus didiskusikan dalam proposal proyek. Penilaian aktual atas kesesuaian mitigasi lingkungan akan dilakukan di Tahap Dua.
• Kesenambungan proyek			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk proyek yang memerlukan pembiayaan terus menerus (misalnya untuk keperluan operasional dan pemeliharaan) sumber pembiayaan telah diidentifikasi, dan kemungkinan pembiayaan tersebut di masa depan telah dinilai. Penilaian kesinambungan proposal dan kemungkinan risiko terkait dengan hal ini berada pada tingkat minimum.
• Tidak berada dalam Daftar Pengecualian EDFF			<ul style="list-style-type: none"> • Ada sejumlah sektor/kegiatan yang tidak dapat dibiayai EDFF, karena bertentangan dengan kebijakan Bank Dunia. Harap dilihat catatan di bagian akhir.

Tahap Dua Kriteria Teknis					
Kriteria	Tidak Berlaku	0 – 70 poin	71 – 89 poin	90 - 100 poin	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> Solusi berorientasi pasar 					<ul style="list-style-type: none"> Apakah ini merupakan solusi terhadap kegagalan pasar? Apakah intervensi yang disarankan berorientasi pasar yang melakukan intervensi ke pasar yang sesuai dengan meminimalkan distorsi? Apakah hal ini mendukung pengembangan lembaga dan organisasi yang memfasilitasi kegiatan pasar yang efisien secara ekonomis? Apakah hal ini mendorong kegiatan kewiraswastaan setempat?
<ul style="list-style-type: none"> Hasil yang jelas dalam satu dari tiga area yang didukung oleh Komponen 1 EDFF: <ul style="list-style-type: none"> (i) Peningkatan Lingkungan Bisnis (ii) Dukungan Sektor Swasta (iii) Infrastruktur Publik 					<ul style="list-style-type: none"> Proposal secara jelas mengidentifikasi apa yang akan menjadi hasil subproyek. Proposal memiliki Indikator Kinerja Utama (KPI) yang didefinisikan dengan jelas dan target yang jelas. Proposal harus menjelaskan secara meyakinkan bagaimana KPI subproyek akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan EDFF: (i) pengembangan usaha pencipta lapangan kerja berbasis pasar yang terlibat dalam pemrosesan dan manufaktur bernilai tambah, terutama di bidang pertanian dan perikanan; (ii) peningkatan kualitas dan nilai produksi yang berkesinambungan di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan yang memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan; (iii) peningkatan perdagangan internasional, terutama ekspor langsung; dan (iv) peningkatan dalam investasi domestik dan asing di Aceh. Proposal harus menjelaskan bagaimana usulan KPI selaras dengan indikator hasil yang ditetapkan dalam kerangka kerja EDFF M&E dalam satu atau beberapa area yang didukung oleh EDFF: (i) Peningkatan Lingkungan Bisnis, (ii)

Tahap Dua Kriteria Teknis					
Kriteria	Tidak Berlaku	0 – 70 poin	71 – 89 poin	90 - 100 poin	Penjelasan
					<p>Dukungan Sektor Swasta, (iii) Infrastruktur Publik. Kerangka Kerja M&E akan tersedia untuk pemberi proposal subproyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal harus menjelaskan secara meyakinkan bagaimana KPI untuk proyek akan diukur, termasuk ketersediaan titik awal dan pengumpulan informasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan pengganda ekonomi 					<ul style="list-style-type: none"> • Proposal harus mengidentifikasi cara di mana subproyek akan memiliki dampak pada ekonomi, yang menciptakan efek pengganda ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memampukan sejumlah orang untuk mendapatkan penghasilan ○ Menciptakan lapangan kerja ○ Proyek akan memampukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sektor swasta yang produktif. ○ Berfokus pada produk bernilai tambah yang tinggi dan pemrosesan komoditas mentah di Aceh
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas rancangan proyek dan identifikasi ‘faktor keberhasilan’ dan ‘pelajaran yang didapatkan’ dari kegiatan lain yang telah dilaksanakan. 					<ul style="list-style-type: none"> • Proposal mencakup analisis kegiatan relevan yang telah dilaksanakan di Aceh dalam usaha rekonstruksi • Analisis mengakibatkan identifikasi ‘faktor keberhasilan’ untuk pelaksanaan atau pelajaran yang didapatkan • Faktor keberhasilan dan pelajaran yang didapatkan telah disertakan dalam rancangan subproyek
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kegagalan rendah 					<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kegiatan memiliki risiko pelaksanaan dan teknis yang rendah. • Proposal mencakup penilaian risiko yang secara objektif menilai risiko dan secara meyakinkan menjelaskan tindakan mitigasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang Merata 					<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kegiatan mendorong hasil merata yang mengatasi kesenjangan sosioekonomi dengan memberi manfaat terutama, secara langsung atau tidak

Tahap Dua Kriteria Teknis					
Kriteria	Tidak Berlaku	0 – 70 poin	71 – 89 poin	90 - 100 poin	Penjelasan
					langsung, kepada kelompok masyarakat paling miskin dan paling termarginalkan (misalnya wanita yang miskin dan rentan).

Tahap Tiga Kriteria Pelaksanaan					
Kriteria	0 – 70 poin	71 – 89 poin	90 – 100 poin	Penjelasan	
<ul style="list-style-type: none"> Catatan riwayat badan pelaksana 				<ul style="list-style-type: none"> Proposal mencakup informasi mengenai pengalaman dan hasil yang ditunjukkan badan pelaksana sehubungan dengan pengadaan, Pengelolaan Keuangan serta Pengawasan dan Evaluasi 	
<ul style="list-style-type: none"> Komposisi dan keahlian tim 				<ul style="list-style-type: none"> Proposal mencakup informasi tim yang akan bertanggung jawab atas subproyek, termasuk CV, posisi, dan lainnya. 	
<ul style="list-style-type: none"> Akuisisi input yang diperlukan demi keberhasilan dapat segera didapatkan 				<ul style="list-style-type: none"> Sesuai keperluan 	
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat dukungan pemerintah daerah 				<ul style="list-style-type: none"> Tingkat tertinggi dukungan pemerintah daerah adalah pembiayaan bersama untuk proyek oleh pemerintah daerah atau Dinas yang terkait 	
<ul style="list-style-type: none"> Dapat diawasi menggunakan proses pengawasan dan pelaporan 				<ul style="list-style-type: none"> Proyek memiliki prosedur pengawasan keuangan dan teknis proyek, misalnya <ul style="list-style-type: none"> Pencairan dana terkait dengan verifikasi kemajuan proyek (misalnya 	

Tahap Tiga Kriteria Pelaksanaan				
Kriteria	0 – 70 poin	71 – 89 poin	90 – 100 poin	Penjelasan
prapengembangan				<ul style="list-style-type: none"> gerbang tahap) <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dana dan teknis yang diaudit oleh pihak ketiga
<ul style="list-style-type: none"> Hasil yang dapat dibuktikan atas pengalaman keberhasilan dan kemampuan untuk dengan cepat melakukan replikasi dan/atau meningkatkan skala kegiatan 				<ul style="list-style-type: none"> Hal ini dapat diterapkan pada semua subproyek yang berusaha meningkatkan skala kegiatan masa lalu, atau menduplikasinya di area lain.
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengembangan kapasitas lembaga setempat (pemerintah tingkat provinsi atau kabupaten, LSM setempat, universitas) 				<ul style="list-style-type: none"> Proyek memprediksikan transfer pengetahuan ke lembaga setempat sepanjang masa proyek, misalnya pelaksanaan bersama, pemberian sebagian hibah ke lembaga setempat, pengembangan kapasitas dalam rancangan proyek, dan lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> Transfer pengetahuan dan teknologi baru atau model bisnis 				<ul style="list-style-type: none"> Rancangan proyek mendorong transfer pengetahuan dan model bisnis atau teknologi ke sektor swasta setempat, melalui pelaksanaan atau sebagai hasil dari pelaksanaan proyek (misalnya dengan mempromosikan penyebaran dan transfer teknologi).
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat keterlibatan sektor swasta 				<ul style="list-style-type: none"> Proyek harus menunjukkan tingkat keterlibatan sektor swasta dalam proyek, misalnya dalam rancangan, pelaksanaan, pembiayaan bersama, dan lainnya.

Daftar Pengecualian EDFF: Jenis subproyek berikut tidak akan dibiayai melalui proyek EDFF:

1. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang atau peraturan negara asal atau konvensi dan kesepakatan internasional, atau tunduk kepada pelarangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, bahan perusak ozon, PCB, binatang liar atau produk yang diatur berdasarkan CITES.
2. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi.
3. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (kecuali bir dan anggur).
4. Produksi atau perdagangan tembakau atau produk tembakau.

5. Perjudian, kasino dan usaha serupa.
6. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif. Hal ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan (pengukuran) kendali kualitas dan peralatan lain yang sumber radioaktifnya dianggap oleh Bank Dunia tidak berarti dan/atau telah cukup dilindungi.
7. Produksi atau perdagangan serat asbes tidak terikat. Hal ini tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan lembar semen asbes terikat yang muatan asbesnya kurang dari 20%.
8. Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk kerja paksa/buruh anak yang membahayakan atau mengeksploitasi.
9. Operasi penebangan kayu komersial untuk digunakan terutama di hutan tropis.
10. Produksi atau perdagangan kayu atau produk hutan lain selain dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan.
11. Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi bahan kimia berbahaya dalam volume besar, atau penggunaan bahan kimia berskala komersial. Bahan kimia berbahaya mencakup bensin, minyak tanah, dan produk minyak bumi lain.
12. Produksi atau kegiatan yang melanggar tanah yang dimiliki, atau diklaim berada di bawah adjudikasi, oleh Penduduk Asli, tanpa izin lengkap tertulis dari penduduk tersebut.
13. Kegiatan produksi emisi air limbah gas atau cair di tingkat yang membahayakan.
14. Kegiatan terkait perikanan yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Layanan Perikanan.

LAMPIRAN 1. CONTOH APLIKASI SUBPROYEK⁵

A. Judul Subproyek – _____

B. Rangkuman Subproyek Ringkas

C. Perincian Pemberi Dukungan Proposal

Pemberi dukungan proposal proyek:	
Orang yang dapat dihubungi/jabatan:	
Informasi kontak (telepon/alamat):	
Email dan telepon kontak:	
Orang yang dapat dihubungi dan Jabatannya dari Pihak Berwenang Setempat yang mendukung	

⁵ SIE tidak boleh terbatas oleh ruang yang tersedia di beragam kolom contoh aplikasi ini. SIE dapat bebas menyesuaikan ruang sesuai kebutuhan.

subproyek ini	
Identifikasikan Dinas dan orang yang dapat dihubungi yang telah mendiskusikan proposal (jika perlu)	

Informasi latar belakang mengenai pemberi dukungan proposal subproyek dan kemampuan terkait subproyek.

D. Perincian Subproyek

(Silakan merujuk ke Kriteria Pemilihan untuk panduan tambahan)

	Penjelasan
Identifikasikan lokasi kegiatan utama subproyek dan identifikasikan kegiatan ekonomi utama saat ini di area yang diidentifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Desa • Kecamatan • Kabupaten 	
Identifikasikan area/sektor RPJM Pemda Aceh yang harus ditangani melalui proyek	
Jumlah Pendanaan EDFD yang diminta dan rencana pengeluaran yang diperinci dengan kemungkinan pengeluaran dan kegiatan Rencana Pengadaan dan Pencairan Dana akan diperlukan dalam persiapan proyek. Rencana ini dapat diserahkan dalam bentuk draf pada saat aplikasi sebagai pengganti memberi tanggapan pada poin ini	
Berikan prioritas yang ditetapkan dalam EDFD yang akan ditangani oleh	

	Penjelasan
subproyek	
Seberapa cepat subproyek dapat dilaksanakan? Sediakan batasan waktu	
<p>Sediakan penjelasan singkat mengenai tujuan, output, hasil dan dampak (sesuai keperluan) jangka pendek, menengah dan panjang. Sertakan penjelasan mengenai bagaimana subproyek diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan EDFF dan RPJM Pemerintah</p> <p>(Harap dicatat bahwa perincian lebih lanjut akan diperlukan dalam persiapan, tapi dapat disediakan pada saat aplikasi)</p>	
Identifikasikan kesenjangan dalam kegiatan sektor swasta dan ekonomi saat ini yang dapat ditutup melalui subproyek	
Jelaskan bagaimana masyarakat setempat terlibat dalam menentukan cakupan proyek dan peran apa yang akan mereka dapatkan dalam pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi (sesuai keperluan)	
Sediakan nama lembaga Pemerintah yang terkait dengan proyek sekaligus nama orang yang dapat dihubungi dan setiap indikasi dukungan tertulis untuk subproyek	
Sediakan bukti kesinambungan kegiatan yang dibiayai (jika perlu) setelah subproyek difinalisasi	
Pertanyaan umum mengenai kapasitas dalam melaksanakan subproyek	
Jelaskan kesinambungan subproyek	

E. Penjelasan Proyek Terperinci

Berikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai usulan subproyek. Sertakan:

- Penjelasan kegiatan utama subproyek
- Identifikasi perkiraan penerima manfaat/pemangku kepentingan
- Penjelasan kaitan usulan subproyek ke sektor swasta
- Identifikasi area yang akan diatasi dan perkiraan hasil subproyek serta proses pencapaiannya
- Penjelasan dampak potensial subproyek atas perekonomian Aceh
- Identifikasikan penerima manfaat dan bagaimana subproyek diperkirakan memberi manfaat bagi kelompok yang termarginalkan, terutama wanita
- Identifikasi risiko yang terkait dengan subproyek dan pernyataan singkat mengenai bagaimana risiko tersebut akan diatasi atau tidak akan mempengaruhi proyek
- Informasi mengenai langkah tambahan apa yang tersisa jika subproyek tidak akan mengatasi suatu masalah secara lengkap dan proyeksi biaya sampai tahap penyelesaian
- Perincian mengenai biaya administratif yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan subproyek

F. Perincian Pelaksanaan

Jelaskan pengaturan pelaksanaan kelembagaan	
Diskusi mengenai riwayat pemberi proposal dalam melaksanakan jenis proyek serupa	
Penjelasan tim dan jika memungkinkan identifikasi anggota tim dan latar belakang mereka yang relevan dengan subproyek	
Identifikasikan prasyarat untuk keberhasilan proyek serta bagaimana prasyarat tersebut akan dicapai dan data titik awal jika ada atau bagaimana prasyarat akan dikumpulkan dalam menetapkan penelusuran hasil.	
Jelaskan secara singkat bagaimana subproyek akan diawasi dan bagaimana subproyek akan dimasukkan ke dalam keberhasilan EDFD secara keseluruhan, misalnya <ul style="list-style-type: none">• Jumlah investasi usaha• Total nilai investasi• Pekerjaan yang diciptakan oleh usaha• Nilai tambah dari usaha• Nilai ekspor• Profitabilitas usaha• Dampak pada penghasilan penerima manfaat	
Jika usulan subproyek merupakan replikasi proyek sebelumnya, atau tindak lanjut pekerjaan sebelumnya, sediakan informasi mengenai keberhasilan pekerjaan sebelumnya dan bagaimana pelajaran yang didapatkan dapat diterapkan pada subproyek ini.	
Jelaskan bagaimana proyek akan mentransfer pengetahuan/kapasitas kepada pemerintah atau masyarakat setempat	
Diskusikan peran keterlibatan sektor swasta dalam subproyek	